

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; fungsi distribusi yang meliputi, antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan; dan fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakatnya.

Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda dari masing-masing wilayah. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah secara jelas dan tegas. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kewenangan diberikan pada pemerintah daerah, kecuali untuk lima hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu pembiayaan bagi politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, pengelolaan moneter dan fiskal, agama, serta kewajiban pengembalian pinjaman pemerintah pusat.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba badan usaha milik daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Penjelasan tentang sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah otonom di atas mengisyaratkan bahwa daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan sendiri secara optimal, sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat tidak terlalu tinggi. Ini artinya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan pembangunan harus bisa menjadi sumber pembiayaan terbesar.

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan membentangkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu pembelajaran bagi masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep ekonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan oleh kita semua.

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan

tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah tentu daerah membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit guna menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber – sumber pendapatan daerah yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan sumber kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang lain
- b. Dana perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pembentukan pemekaran wilayah daerah kabupaten/kota bertujuan untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami tentang kebutuhan masyarakat setempat yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator penting keberhasilan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah besarnya kontribusi PAD dalam APBD. Semakin besar PAD dalam APBD semakin mandiri daerah otonom tersebut.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang perekonomiannya dari tahun ke tahun secara umum didominasi oleh kegiatan primer, yang terdiri dari sektor pertanian dan perikanan dan kegiatan sekunder yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa.

Kabupaten Ciamis adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Ciamis. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kunungan di utara Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar di timur, Samudera Hindia di selatan, serta kabupaten Tasikmalaya di barat

Kabupaten Ciamis terdiri dari 30 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan dengan pusat pemerintahan di kecamatan Ciamis. Kecamatan Banjar yang dulunya bagian dari Kabupaten Ciamis, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 11 Desember 2002 menjadi daerah otonom sendiri, yang terpisah dari Kabupaten Ciamis. Selain itu bagian Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran pada tanggal 25 Oktober 2012 menjadi Kabupaten Pangandaran yang memiliki 10 Kecamatan.

Persoalan PAD di Kabupaten Ciamis memberikan dampak terhadap masyarakat, dimana Kabupaten Ciamis. Penanganan terhadap realisasi PAD masih banyak tersendat, seperti anggaran dana yang kurang terdistribusi dengan merata, masalah penduduk, fluktuatif dan lain-lain.

Kesenjangan distribusi pendapatan yang besar pun membuat kemiskinan tidak merata menurut Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat

Agung Laksono bahwa tingkat kemiskinan dan disparitas antarprovinsi masih besar. Masih banyak daerah di Indonesia yang tingkat kemiskinannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Penduduk miskin masih terkonsentrasi di pedesaan.¹ Ini diakibatkan oleh cukup jauhnya perbedaan tingkat distribusi pendapatan.

Salah satu permasalahan penting dalam pembangunan adalah masalah kependudukan. Jumlah penduduk yang banyak merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan apabila diimbangi oleh kualitas yang baik, namun sebaliknya apabila kualitasnya rendah maka akan menjadi beban bagi pemerintah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ciamis sesuai dengan tahun 2011 jumlah penduduknya telah mencapai 1.774.032 jiwa dengan rincian jumlah penduduk lelaki 889.918 jiwa, perempuan 884.114 jiwa jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 6,0%. Adapun permasalahan yang mempengaruhi variabel-variabel khususnya PAD Kabupaten Ciamis yang ditinjau hasil pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah :

¹<http://www.tempo.com>, Angka Kemiskinan Cuman Turun 0,7 Persen, Jakarta, 08.01.2013, diunduh 25 maret 2013

Tabel 1.1**Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (jutaan rupiah)**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah	PAD Lain	Total PAD
2007	5.477	23.390	1.094	24.749	54.711
2008	6.882	27.212	1.387	11.365	46.847
2009	8.188	35.167	1.841	6.078	51.276
2010	8.148	30.786	2.311	9.267	50.512
2011	12.312	35.248	2.368	8.970	58.900
2012	17.853	32.216	1.867	7.594	59.530
2013	17.370	31.834	1.396	7.489	58.089

Tabel I.1 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel 1.2**PAD 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013 (jutaan rupiah)**

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	4.412	4.146	4.316	4.211	4.489	4.012	4.251
Pangandaran	14.562	14.418	14.517	15.395	15.581	15.715	15.619
Banjarsari	3.864	3.693	3.810	3.690	3.862	3.791	3.975
Ciamis	9.261	9.765	9.782	10.914	10.951	10.015	10.215
Panjalu	4.156	3.915	4.065	4.104	4.062	4.181	4.016
Sindangkasih	5.163	5.075	5.314	5.064	5.492	5.371	5.262
Sukadana	4.975	4.461	4.477	4.206	4.061	4.017	4.190

Tabel 1.2 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terjadi fluakuatif di semua faktor yang mempengaruhi PAD, serta tren penurunan 2 tahun terakhir.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selama kurun waktu dari tahun 2007 s.d. 2013, pajak daerah yang diteliti adalah perolehan pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah sebesar 10%, Pajak Hotel Kabupaten Ciamis cenderung mengalami peningkatan, tetapi ada juga tren penurunan seperti tabel dibawah :

Tabel 1.3

Pajak Hotel 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013 (ribuan rupiah)

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	50.176	58.533	68.533	89.453	82.973	94.986	91.123
Pangandaran	380.013	450.246	510.269	880.154	620.102	850.795	1.223.421
Banjarsari	60.878	70.612	78.620	82.460	81.960	89.120	84.341
Ciamis	220.714	302.755	382.509	422.459	420.324	550.453	721.714
Panjalu	45.518	52.178	59.875	55.855	52.557	68.742	89.897
Sindangkasih	42.903	49.832	57.940	50.530	50.825	62.721	73.124
Sukadana	40.572	48.804	58.324	55.274	55.464	67.734	82.983

Tabel I.3 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Tabel 1.4

Total Pajak Hotel Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Hotel (rupiah)
2007	1.000.527.451
2008	1.500.311.508
2009	2.165.941.801
2010	1.854.104.374
2011	3.872.308.584
2012	4.298.651.462
2013	4.851.124.572

Tabel I.4 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Pada tahun 2008 pajak hotel Kabupaten Ciamis meningkat dari tahun 2007 hingga 500 jutaan rupiah hal ini disebabkan oleh pembangunan hotel disekitaran area perkotaan, kemudian meningkat hingga 300 jutaan rupiah pada 2009 dan mengalami penurunan pada 2010 oleh alokasi lahan hotel-hotel lama menjadi taman-taman kota dan bangunan lain hingga penurunan mencapai 5 jutaan rupiah, peningkatan sangat signifikan terjadi pada tahun 2011 sebesar 2

miliar rupiah, pembangunan hotel di area wisata meningkat tajam menjadi penyebabnya. Dua tahun terakhir mengalami peningkatan kembali yang cukup signifikan. Rata-rata penerimaan sektor ini mencapai Rp. 2.784.709.857

Pajak Restoran

Tabel 1.5

Pajak Restoran 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013 (ribuan rupiah)

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	58.921	50.412	69.531	82.456	89.844	94.341	99.624
Pangandaran	370.513	420.156	540.241	660.541	910.821	890.451	1.323.241
Banjarsari	61.472	75.324	81.523	80.031	90.831	89.120	84.930
Ciamis	210.434	310.321	375.501	492.124	452.523	590.823	751.512
Panjalu	46.731	53.431	55.513	52.453	62.421	61.531	92.421
Sindangkasih	45.124	51.803	57.910	55.451	50.462	63.124	75.432
Sukadana	44.124	49.812	59.344	56.221	55.424	65.234	85.123

Tabel 1.5 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Tabel 1.6

Total Pajak Restoran Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Restoran (rupiah)
2007	1.123.748.822
2008	1.604.123.190
2009	2.401.237.242
2010	1.950.732.123
2011	4.078.572.123
2012	4.498.321.511
2013	4.801.112.345

Tabel 1.6 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Pajak restoran di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan pada tahun 2008 dari tahun sebelumnya sebesar 500 jutaan rupiah dikarenakan penurunan kunjungan konsumen, pada 2009 mengalami peningkatan cukup signifikan hingga hampir 1 miliar rupiah diakibatkan pembangunan restoran di daerah perkotaan Kabupaten Ciamis, tren penurunan kembali terjadi pada tahun 2010

sebesar 500 jutaan rupiah, angka penurunan kunjungan konsumen menjadi penyebab utamanya, pada 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan sangat signifikan hingga 2 miliar rupiah lebih dengan menjamurnya restoran-restoran di area wisata. Rata-rata penerimaan pada sektor pajak restoran mencapai Rp. 2.922.549.571

Sedangkan dari semua pajak daerah yang masuk untuk PAD Kabupaten Ciamis yang berasal dari Pajak Hotel dan Restoran yang rata-ratanya mencapai Rp 2.878.629.714 atau 37,7% dari seluruh penerimaan pajak daerah selama kurun waktu tersebut.

Total rata-rata penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis-jenis yang meliputi pajak daerah, seperti pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dll :

Tabel 1.7

Total Rata-rata Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ciamis

Tahun 2007 s.d. 2013

No	Pajak Daerah	Rata-Rata Dalam Rp	Rata-Rata dalam %
1	Pajak Hotel dan Restoran	2.903.629.714	37,7
2	Pajak Hiburan	4.752.588.220	54,08
3	Pajak Reklame	348.993.710	5,351
4	Pajak Penerangan Jalan	93.043.000	1,260
5	Pajak Bahan Galian Gol C	14.518.010	0,280
6	Pajak ABT dan AP	46.361.379	0,628
7	Pajak Parkir	103.470.900	1,290
8	Tunggakan Pajak	17.485.780	0,212
9	Denda Pajak	49.000	0,000
Total		7.653.128.619	100,000

Tabel I.7 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Sesuai dengan prinsip ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Untuk pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah masing-masing guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan daerah tetap berjalan, akan tetapi bukan berarti setiap pemerintahan daerah otonom harus membiayai keseluruhan keperluan dari PAD.

Berdasarkan semua data yang berhasil diperoleh peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjawab permasalahan kuncinya yaitu :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah ?
2. Sejauh mana pengaruh sektor pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
3. Sejauh mana pengaruh sektor pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

Kenyataan yang sekarang terjadi adalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan (*coverty trap*), deprivasi (*social deprivation*), isolasi dan ketidakberdayaan dan ketiadaan akses kepada sumber daya alam, sarana dan

prasarana sosial ekonomi dan kesenjangan (Chambers 1983)². Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dimana tujuannya adalah ingin memecahkan konsep Pendapatan Asli Daerah berdasarkan sumber daya alam.

Banyak para ahli yang memprediksikan pertumbuhan ekonomi Ciamis akan mengalami keguncangan dan sulit bangkit terutama daerah Pangandaran pasca bencana alam Tsunami. Apalagi disaat yang bersamaan terjadi juga bencana alam di pelosok negeri ini. Perhatian pemerintah pun terbelah dan banyak juga dana bantuan dan daya tersedot habis ke Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dsb³.

Ekonomi Ciamis sudah jelas, membangun kembali ekonomi disana membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit. Mata rantai ekonomi yang terputus dibagian akhir, harus dibangun kembali dengan motivasi yang tinggi. Kalau tidak pembangunan ekonomi Ciamis akan tertatih dan menyedihkan bagi masyarakat disana. Mata rantai ekonomi yang paling akhir yakni, pemasaran. Itulah yang dibangun. Produksi, distribusi, relati tidak terganggu⁴. Produksi yang terganggu paling hanya nelayan (produksi ikan) itupun hanya sebentar, saat ini para nelayan di Pangandaran sudah berani melaut kembali. Yang mungkin agak lama adalah mengembalikan image masyarakat penggemar pantai (turis) menghapus bayang-bayang tsunami Pangandaran. Padahal, segmen ini merupakan pasar potensial sekali⁵.

²*Rural Development : Putting The Last First*, Robert Chambers 1983; *Rural Appraisal Rapid, Relaxed, and Participatory* (1992) dan *Whose Voice Counts?: Putting The First Last*, Robert Chambers, 1997.

³ [http : www.mypangandaran.com/](http://www.mypangandaran.com/)

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Peneliti agak bersebrangan dengan pendapat-pendapat yang selama ini mengemuka bahwa pembangunan ekonomi Pangandaran, relatif sulit bangkit atau dengan kata lain, ekonomi Pangandaran dalam waktu dekat perlu dibantu secara terus menerus⁶.

Dari data-data yang peneliti punyai, justru Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang tingkat penganggurannya relatif rendah. Bahkan Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten yang paling rendah tingkat penganggurannya di Jawa Barat. Kabupaten Ciamis dan merupakan yang paling tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja wanitanya⁷.

Kabupaten Ciamis ekonominya bertumbuh pada potensi-potensi kekayaan alam daerah yang dibantu dengan sektor UKM. dan berkembangnya UKM disini didukung berbagai data silang, baik Perum Pegadaian, Bapeda Jawa Barat, dan data – data yang dikemukakan oleh Kantor Sensus dan Statistik⁸.

Efek multiplier berdampak sangat signifikan terhadap pembangunan daerah Ciamis. Disinilah diparsitas pendapatan atau gap (jurang pemisah) antara yang kaya dan miskin relatif kecil. Tidak seperti pembangunan dibelahan Jawa Barat yang lain yang didukung oleh industri padat modal, pengiriman TKI ke luar negeri atau ekonomi perkotaan yang tumbuh oleh perdagangan modern.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Dengan melalui pendekatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis dengan melalui seberapa pentingnya dan sadarnya mereka akan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan baru-baru ini yang pernah dilontarkan oleh Presiden Jokowi, dimana Indonesia akan terus berusaha mengembangkan dan menjaga kelautan dan kemaritiman yang kita punya untuk membantu perekonomian nasional dan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan berkurangnya angka kemiskinan. Keterkaitan hasil pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah akan meningkatkan tingkat pendapatan asli suatu daerah dan menurunkan angka kemiskinan, baik dalam ruang lingkup lokal maupun nasional.

Dengan penjelasan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk membahas tentang Pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah dengan pesisir yang mempunyai potensi untuk berkembang.

Penelitian dilakukan pada kelompok masyarakat daerah Kabupaten Ciamis yang merupakan salah satu kabupaten pesisir potensial di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diambil dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
2. Pengaruh pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Ciamis

3. Pengaruh sumber daya manusia terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
4. Pengaruh sumber daya alam terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
5. Pengaruh Pungutan Pajak terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
6. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
7. Pengaruh kesadaran masyarakat dan keamanan terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
8. Pengaruh kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
9. Pengaruh PAD yg lain-lain terhadap PAD di Kabupaten Ciamis

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, ternyata masalah tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung dengan adanya dugaan saling keterkaitan yang erat antar entitas tersebut, maka peneliti membatasi ruang lingkup dengan meneliti hasil pajak daerah, dengan pengaruh pajak hotel dan restoran sebagai faktor yang mempengaruhi (determinan) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan pembatasan masalah yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: “Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoretis maupun empiris mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi mengenai pengaruh faktor-faktor atau variabel-variabel ekonomi makro terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat digunakan juga sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor lainnya atau variable-variabel lainnya dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan di bagian data Badan Pusat Statistik Indonesia diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah mengenai opsi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).